

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Di era saat ini yang ditandai dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis digital, praktik demokrasi telah dimediasi sedemikian rupa.¹ Ketika perkembangan teknologi digital memediasi hampir seluruh praktik politik, banyak para sarjana memahami demokrasi secara baru sehingga muncul istilah demokrasi digital. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemahaman mengenai demokrasi digital bukan dalam arti perubahan secara substansial dari demokrasi, namun demokrasi digital dipahami dalam konteks bagaimana teknologi informasi dan komunikasi digital (internet dan media sosial) digunakan dalam praktik demokrasi.²

Istilah demokrasi digital dibentuk berdasarkan perpaduan antara teknologi digital dan demokrasi. Teknologi digital dan demokrasi mendasari seluruh diskursus tentang demokrasi digital. Itu berarti terdapat tautan antara demokrasi dan teknologi digital, di mana keduanya sama-sama bagian dari sejarah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan keduanya bersifat simbiosis (timbal balik), yakni teknologi digital membawa terobosan baru dalam dinamika demokrasi, sebaliknya atas dasar inklusivitas, demokrasi memberi ruang untuk terwujudnya partisipasi politik melalui penggunaan teknologi digital.

Dalam demokrasi digital, internet dan media sosial telah memainkan peran penting dalam mewujudkan proses dinamika demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.³ Dalam konteks partisipasi politik, perkembangan teknologi digital yang pesat memungkinkan partisipasi rakyat menjadi lebih luas, inklusif dan

¹ Asep A. Sahid Gatara, "Demokrasi Nothing: Kritik Terhadap Konsep dan Praktek Cyberdemocracy", *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi-22 (2016), hlm. 1.

² Desi Albert Mamahit, "Demokrasi Digital dan Manajemen Pertahanan Negara Indonesia", dalam Nasir Tamara (ed.), *Demokrasi di Era Digital* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 295.

³ *Ibid.*

terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan politik.⁴ Melalui penggunaan internet dan media sosial, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam urusan politik dengan melakukan transaksi informasi, baik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Dalam dinamika demokrasi di era digital seperti sekarang ini, para pelaku politik tidak lagi membutuhkan kehadiran secara fisik ke dalam medan-medan politik untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Pelaku politik dapat menyebarkan pesan-pesan politik kepada publik melalui alat-alat teknologi informasi dan komunikasi digital. Sebaliknya, masyarakat juga dapat memberi komentar dan menanggapi pesan-pesan yang disampaikan para pelaku politik secara langsung atau interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁵ Dengan demikian, jarak antara masyarakat dan pemerintah semakin dekat karena dimediasi oleh teknologi digital.

Demokrasi digital memungkinkan terjadinya transaksi informasi politik, amplifikasi diskursus publik, dan warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan politik.⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan Roza Tsagarousianou (1999) yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga klaim bagaimana demokrasi digital mempengaruhi kehidupan politik. *Pertama*, demokrasi digital memungkinkan terjadinya pengambilan dan pertukaran informasi politik antar pemerintah, publik, perwakilan organisasi politik dan komunitas serta warga negara. *Kedua*, demokrasi digital memungkinkan terjadinya debat publik, musyawarah dan pembentukan komunitas. *Ketiga*, demokrasi digital meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik.⁷

Pesatnya kemajuan teknologi digital turut mengubah cara masyarakat berpolitik. Selain itu, pemerintah juga mengalami perubahan dalam cara berpolitik.

⁴ Elizamiharti dan Nelfira, "Demokrasi di Era digital: Tantangan dan Peluang dalam Partisipasi Politik", *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2:1 (Januari 2024), hlm. 62.

⁵ Nur Hidayat Sardini, "Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan" (Artikel yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2018), hlm. 125.

⁶ Veronica Hamid, "Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial", dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 743.

⁷ Jan A.G.M. Van Dijk, "Digital Democracy: Vision and Reality", (Enschede: University of Twente, Department of Media, Communication and Organization, 2013), hlm. 5-6.

Urusan politik tidak lagi hanya diperankan secara tersembunyi oleh elit politik, tetapi menjadi urusan semua warga negara. Rakyat tidak membiarkan rezim menjalankan urusan politik secara eksklusif dan berusaha memonopoli peran rakyat, terutama dalam momentum pengambilan kebijakan. Melalui inklusivitas informasi, warga negara tahu arah kebijakan politik terbaru. Kebijakan politik tidak lagi diputuskan berdasarkan kehendak penguasa saja, melainkan semua warga negara dilibatkan dalam ruang deliberasi yang diperantarai teknologi digital supaya kebijakan dibangun atas dasar prinsip demokratis (musyawarah).

Demokrasi digital dapat mentransformasi hampir seluruh praktik politik menjadi terdigitalisasi. Hal ini dapat terlihat pada terjadinya digitalisasi ruang publik (*cybersphere*), partisipasi publik, komunikasi politik, informasi kebijakan pemerintah, geliat kritik dan kontrol publik, kampanye partai politik, proses pemilu, dan lain sebagainya. Seluruh aktivitas tersebut yang dulu biasanya dijalankan secara konvensional melalui penyaluran informasi dan komunikasi politik secara *face to face* yang kadang-kadang cenderung lamban akibat hambatan kondisi geografis dan waktu, sekarang beralih menjadi aktivitas yang terhubung dalam sistem jejaring internet dengan penyebaran informasi dan komunikasi politik yang cepat dan interaktif. Hal ini merupakan terobosan baru dalam aktivitas politik dan kemungkinan besar akan menjadi terobosan masa depan yang berkontinuitas di berbagai negara dan kawasan di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Penting dicatat bahwa alasan mendasar mengapa fenomena demokrasi digital masih dan terus bereksis hingga saat ini adalah karena tidak lepas dari pengguna internet yang begitu besar jumlahnya. Di Indonesia, pengguna internet menembus angka jutaan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.⁸ Masih dari survei yang dilakukan APJII, jumlah penetrasi internet mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sebagaimana dikutip dari laman *website* resminya, APJII mengumumkan bahwa jumlah pengguna internet

⁸ Rahmi Yati, "Survei APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Jutas Orang", dalam *Bisnis.com*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20230308/101/1635219/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>, diakses pada 30 Januari 2024.

Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa.⁹

Jika diselami secara mendalam, demokrasi digital pada dasarnya mengandung unsur ambivalensi. Di tengah meningkatnya manfaat dari kehadiran demokrasi digital, terdapat sisi lain yang menjadi tantangan bagi kehidupan sosio-politik sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital yang tidak bertanggung jawab dan minus moral oleh oknum tertentu.¹⁰ Dengan kata lain, demokrasi digital di satu sisi dapat memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam urusan politik sehingga dapat mendorong demokratisasi. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi digital yang tidak benar dan minus moral justru menciptakan kegaduhan politik sehingga menjadi tantangan yang dapat menghambat demokratisasi.

Peluang yang diberikan demokrasi digital ialah meningkatnya kesempatan partisipasi dan komunikasi politik, seperti kontrol dan kritik publik, ruang diskursus, kebebasan berekspresi, kampanye politik, mobilisasi untuk gerakan massa, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya. Sekadar untuk menengok sejarah misalnya, internet memiliki peluang dalam menumbuhkan demokratisasi. Menurut Merlyna Lim, sejarah politik Indonesia telah menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian dari alat pembentukan aktivitas massa secara *online* yang kemudian menjadi pergerakan nyata di ranah *offline*.¹¹ Untuk menyebut salah satu contoh, internet memiliki peran penting sebagai alat perjuangan aktivis reformasi dalam menumbang rezim otoriter Soeharto pada 1998.¹² Sejumlah aktivis dan mahasiswa waktu itu berusaha memobilisasi massa melalui pesan-pesan yang disampaikan lewat internet. Sebagai tanggapan atas pesan-pesan yang disampaikan, publik

⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “APJII: Jumlah Orang Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, dalam *apjii.or.id*, [¹⁰ Desi Albert Mamahit, *op. cit.*, hlm. 296.](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20menjumlahkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023, diakses pada 23 April 2024.</p></div><div data-bbox=)

¹¹ Merlyna Lim, “Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3:1 (April 2014), hlm.37.

¹² Heru Margianto, “Sejarah Internet di Indonesia dan Perannya Melengserkan Soeharto”, dalam *Kompas.com*, [4](https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/15040091/sejarah-internet-di-indonesia-dan-perannya-melengserkan-soeharto?page=all, diakses pada 31 Januari 2024.</p></div><div data-bbox=)

merasa simpati sehingga ikut terlibat untuk turun ke lapangan secara beramai-ramai.

Selain itu, peluang demokrasi digital ialah kebijakan politik menjadi lebih inklusif dan transparan karena media digital turut membantu pemerintah dalam memberi informasi kepada masyarakat terkait rencana dan pelaksanaan kebijakan politik yang diambil. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya diakui begitu saja, tetapi harus dipertimbangkan dalam konteks budaya diskursus. Peluang inilah yang meyakinkan bangsa di seluruh dunia termasuk Indonesia bahwa demokrasi digital memang menjadi harapan sekaligus terobosan baru dalam mendorong demokratisasi karena mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, keterbukaan, partisipasi, dan lain sebagainya.

Namun di balik banyak peluang yang diberikan, demokrasi digital juga turut berkontribusi destruktif, di mana menghadirkan tantangan bagi dinamika politik yang dapat menghalangi upaya demokratisasi. Tantangan dari demokrasi digital tidak terlepas dari penggunaan media digital dan internet yang tidak benar, cenderung anarkis, fanatik, irasional, dan bermental instan. Ketika demokrasi digital menyediakan secara maksimal ruang partisipasi publik, ada pihak tertentu yang memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen untuk menyebarkan disinformasi dan narasi politik yang berbaur provokasi, seperti hoaks, ujaran kebencian, penyebaran ideologi ekstrim (fundamentalisme-radikalisme) dan lain sebagainya. Tindakan tidak bermoral ini secara sporadis menciptakan kegaduhan atau *chaos* di tengah tatanan sosial-politik masyarakat. Penyebaran disinformasi dan narasi provokasi ini di satu sisi memang dilihat sebagai representasi dari prinsip kebebasan dalam demokrasi, akan tetapi di sisi lain disinformasi tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, misalnya kepentingan politik.

Atas nama kebebasan, pihak tersebut cenderung bersikap keablasan dengan mengabaikan hukum yang ada. Kita bisa ambil salah satu contoh, penyebaran hoaks-berita bohong. Distorsi fakta dalam hoaks menjadi hal yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi digital yang sehat. Hoaks biasanya sengaja didesain, misalnya dalam bentuk ujaran kebencian, penipuan, provokasi, propaganda, pembentukan opini publik dan lain sebagainya dengan

tujun untuk membuat tatanan masyarakat menjadi kacau.¹³ Di sini, hoaks secara sosial dan politik dapat mendestruksikan tatanan demokrasi,¹⁴ menyisakan masyarakat yang terpolarisasi karena semuanya serba dikendali oleh narasi kebohongan, apalagi ditambah minimnya sikap kritisisme publik dalam mengakses informasi sehingga masyarakat cenderung menghakimi yang lain berdasarkan keyakinannya terhadap informasi hoaks.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, demokrasi digital sesungguhnya bersifat ambivalen, yakni di satu sisi membawa beberapa peluang, tetapi di sisi lain menghadirkan sejumlah tantangan bagi tatanan demokrasi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Karena itu, demokrasi digital amat urgen untuk dipertimbangkan lebih jauh, terutama ketika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu apakah kita optimis atau pesimis. Hemat penulis di antara kedua itu, demokrasi digital tetaplah menjadi keniscayaan di era digital sekarang ini. Hal yang perlu dilakukan ialah upaya merawat demokrasi digital yang sehat.

Dalam studi akademis pun, demokrasi digital sangat penting untuk dikaji lebih jauh. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana peluang dan tantangan demokrasi digital bagi dinamika politik. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji peluang dan tantangan demokrasi digital tersebut dengan berfokus pada situasi dan dinamika politik di Indonesia. Karena itu, keseluruhan penjelasan karya ilmiah ini diberi judul: ***AMBIVALENSI DEMOKRASI DIGITAL: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN BAGI DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA.***

1.2 Rumusan Masalah

Sejauh manakah peluang dan tantangan yang diberikan demokrasi digital bagi dinamika politik di Indonesia?

¹³Elva Rini, “Demokrasi dan Hoaks di Era Digital”, dalam *Kompas.TV*, <https://www.kompas.tv/advertorial/241803/demokrasi-dan-hoaks-di-era-digital?page=all>, diakses pada 01 Februari 2024.

¹⁴ Peter Tan, “Hoaks ,Demokrasi Kebablasan dan Bahaya Kekuasaan”, *Seri Buku VOX Ledalero*, 62:02 (2017), hlm. 35-36.

Dari pertanyaan utama di atas, dapat digandakan menjadi beberapa anakan pertanyaan berikut:

- Apa itu demokrasi dan teknologi digital serta bagaimana hubungan keduanya?
- Apa itu demokrasi digital dan sejauh mana kontribusinya dalam metransformasi dinamika politik?
- Di mana letak peluang dan tantangan demokrasi digital bagi dinamika politik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini meliputi dua hal, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis merumuskan beberapa tujuan umum yang menjadi fokus pembahasan yaitu *pertama*, penulis ingin menjelaskan tentang tautan demokrasi dan teknologi digital. *Kedua*, penulis ingin menjelaskan arti demokrasi digital, karakteristik dan sejauh mana demokrasi digital membawa kultur baru dalam praktik politik. Hal ini perlu dijelaskan karena penulis menyadari bahwa masih banyak publik yang belum memahami demokrasi digital secara komprehensif baik dalam hal konseptual maupun praktik. *Ketiga*, karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana demokrasi digital memberi peluang dan tantangan bagi dinamika politik di Indonesia. *Keempat*, karya ilmiah ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat umum terkait bagaimana menjaga demokrasi digital yang sehat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain beberapa tujuan umum di atas, karya ilmiah ini juga mengandung beberapa tujuan khusus antara lain: *pertama*, skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. *Kedua*, tulisan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis terutama dalam berpikir dan menulis. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa yang bergelut dalam dunia filsafat, tulisan ini dibangun untuk

meningkatkan ketajaman intelektual penulis dalam menyikapi, mengkritisi dan menganalisis tentang peluang dan tantangan demokrasi digital bagi dinamika politik di Indonesia.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik penumpukan data dalam penulisan karya ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, skripsi dan literatur lainnya yang relevan dengan topik. Selain itu, penulis juga mencari dan mengangkat kasus yang terjadi di Indonesia sebagai data dan fakta untuk mendukung argumentasi-argumentasi yang dicantumkan dalam landasan konseptual tulisan ini. Beberapa sumber atau acuan utama yang menjadi pendukung penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Buku *Demokrasi Digital: Manusia, Teknologi, dan Kontestasi*, karya yang ditulis M Alfian Alfian. Buku ini mengulas bagaimana teknologi digital membingkai demokrasi. Penjelasan dalam buku ini dimulai dengan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga pengaruhnya dalam mendigitalisasi kehidupan politik dan demokrasi.¹⁵ Buku *Demokrasi di Era Post Truth*, karya dari Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono Barito. Melalui buku ini, kedua penulis menjelaskan tentang pengaruh teknologi komunikasi (internet) dalam kehidupan demokrasi. Buku ini juga mengafirmasi bahwa saat ini dunia telah hidup di era demokrasi digital. Hal ini dikarenakan internet telah terintegrasi dengan demokrasi.¹⁶

Selain buku, penulis juga mendalami berbagai artikel. Artikel dari Elizamiharti dan Nelfira, “Demokrasi di Era digital: Tantangan dan Peluang dalam Partisipasi Politik”. Artikel ini membahas pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap partisipasi politik masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperdalam relasi pemerintah dengan masyarakat.¹⁷ Artikel lain

¹⁵ M Alfian Alfian, *Demokrasi Digital: Manusia, Teknologi, dan Kontestasi* (Tangerang Selatan: Penjuru Ilmu, 2022), hlm. 13.

¹⁶ Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Demokrasi di Era Post-Truth* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 43.

¹⁷ Elizamiharti dan Nelfira, *op. cit.*, hlm. 61-63.

“Demokrasi Digital dan Manajemen Pertahanan Negara Indonesia”, karya Desi Albert Mamahit. Artikel ini membahas gejala demokrasi digital yang bukan hanya memungkinkan partisipasi politik masyarakat menjadi meningkat, tetapi dapat mengancam pertahanan negara melalui berbagai serangan digital, seperti penyebaran disinformasi baik terhadap institusi negara maupun masyarakat umum. Menanggapi ancaman ini, artikel ini merekomendasikan agar pentingnya manajemen pertahanan negara baik oleh pemerintah maupun masyarakat.¹⁸

Penulis juga menelaah artikel dari Veronika Hamid yang berjudul “Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial”. Artikel ini menjelaskan tentang angin harapan yang dibawakan demokrasi digital dalam memperkuat demokrasi. Melalui artikel ini, penulis mengklaim bahwa internet dan media sosial memiliki peran penting dalam melakukan perubahan sosial dan perlawanan terhadap rezim otoriter.¹⁹

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulisan karya ilmiah ini berupaya menjelaskan ambivalensi demokrasi digital, yakni sejauh mana peluang dan tantangan penggunaan teknologi digital bagi praktik politik di Indonesia. Dengan demikian, karya ilmiah ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemahaman yang mendalam mengenai ambivalensi demokrasi digital di Indonesia. Selain itu, karya ilmiah ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempromosikan praktik politik berbasis digital yang sehat dan demokratis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal pokok yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan apa itu demokrasi dan teknologi digital. Dalam bab ini, penulis pertama-tama menguraikan secara umum tentang demokrasi yang meliputi

¹⁸ Desi Albert Mamahit, *op. cit.*, hlm. 295-296.

¹⁹ Veronika Hamid, *op. cit.*, hlm. 721-722.

pengertian, sejarah, konsep-konsep dan prinsip-prinsip demokrasi serta implementasi demokrasi dalam sistem politik di Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan tentang teknologi digital dan bagaimana munculnya media digital. Terakhir, penulis membuat pertautan antara demokrasi dan teknologi digital.

Bab III menjelaskan pemahaman dasar tentang demokrasi digital. Dalam bab ini, penulis akan memberi definisi demokrasi digital, karakteristik demokrasi digital dan bagaimana demokrasi digital metransformasi praktik politik.

Bab IV merupakan bab inti dari keseluruhan penjelasan dalam tulisan ini. Bab ini menjelaskan peluang dan tantangan demokrasi digital bagi dinamika politik di Indonesia. Beberapa peluang dan tantangan demokrasi digital akan dijelaskan secara komprehensif dalam bab ini.

Bab V akan menjadi bagian terakhir dari penjelasan dalam tulisan ini. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.